

Analisis Pengaruh Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Dana Transfer Daerah Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia

Shalma Nur Fadilla¹ Ysma Soleha²

Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia^{1,2}

Email: shalmanurfadilla53@gmail.com¹ ysmasoleha378@gmail.com²

Abstrak

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal diyakini memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat ketimpangan tersebut, khususnya melalui instrumen pajak (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan dana transfer daerah (X3). Analisis dalam studi ini menggunakan data sekunder tahunan periode 2010–2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Dengan pendekatan regresi linear berganda, penelitian ini mengevaluasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap indeks Gini (Y) sebagai indikator distribusi pendapatan. Hasil menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap indeks Gini, sedangkan pengeluaran pemerintah dan dana transfer daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan fiskal dapat mendorong pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Transfer Daerah, Indeks Gini, Regresi Linear Berganda

Abstract

Income inequality remains a major challenge in Indonesia's economic development. Fiscal policy is believed to play a strategic role in reducing such inequality, particularly through instruments such as tax revenue (X1), government expenditure (X2), and intergovernmental fiscal transfers (X3). This study utilizes annual secondary data from 2010 to 2022, sourced from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Finance. Using a multiple linear regression approach, the research examines the influence of these three variables on the Gini index (Y) as a measure of income distribution. The results indicate that tax revenue has a negative effect on the Gini index, while government expenditure and fiscal transfers significantly contribute to reducing income inequality. These findings highlight the importance of optimizing fiscal policy as a means to promote income equality and enhance societal welfare.

Keywords: Fiscal Policy, Tax, Government Expenditure, Fiscal Transfer, Gini Index, Multiple Linear Regression



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan yang adil merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketika pendapatan tidak terdistribusi secara merata, kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, hingga memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan menjadi tujuan fundamental dalam kebijakan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia (Todaro & Smith, 2015). Pemerataan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan ekonomi dari sisi angka makro semata, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan ekonomi yang merata. Dalam konteks ini, distribusi pendapatan yang adil bukan sekadar aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi moral, sosial, dan politik dalam penyelenggaraan negara (Stiglitz, 2012).

Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan secara nasional cenderung menurun, ketimpangan distribusi pendapatan yang tercermin melalui indeks Gini masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara Indonesia bagian barat dan timur. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti keterbatasan infrastruktur, disparitas dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan fiskal antar daerah (Akbar, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif kebijakan fiskal pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian, baik dalam hal menjaga stabilitas, meningkatkan pertumbuhan, maupun mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks distribusi pendapatan, kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan redistribusi kekayaan melalui mekanisme perpajakan, belanja negara, serta dana transfer antar pemerintah (Musgrave & Musgrave, 1989). Pajak, misalnya, berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen untuk mengurangi kesenjangan apabila dirancang secara progresif. Pengeluaran pemerintah di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dapat memberikan dampak langsung terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan (Rahman, 2019). Sementara itu, dana transfer daerah merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar wilayah guna menjamin akses pelayanan publik yang setara di seluruh Indonesia (Nugroho, 2022).

Penelitian ini berangkat dari kerangka pikir bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh nyata terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Dengan memfokuskan pada tiga variabel utama, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan dana transfer daerah, studi ini berupaya untuk menganalisis bagaimana ketiga instrumen tersebut memengaruhi tingkat ketimpangan yang diukur melalui indeks Gini. Dengan menggunakan data tahunan Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 serta pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada pemerataan.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Musgrave & Musgrave, 1989). Instrumen utama dalam kebijakan fiskal meliputi pajak, belanja pemerintah, dan transfer ke daerah. Dalam konteks distribusi pendapatan, kebijakan fiskal memiliki peran penting sebagai alat redistribusi melalui mekanisme subsidi, bantuan sosial, dan alokasi anggaran pembangunan (Mankiw, 2010).

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara dan memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan melalui sistem pajak progresif, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif lebih tinggi (Rosen & Gayer, 2014). Pajak yang efektif tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan sosial.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja barang/jasa, subsidi, dan program sosial memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2012), pengeluaran publik yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar mampu memperkecil jurang kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup kelompok miskin.

Dana Transfer Daerah

Dana transfer merupakan bentuk desentralisasi fiskal untuk menjamin pemerataan keuangan antarwilayah. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, pemerintah pusat mendorong pemerataan pembangunan. Penelitian oleh Nugroho (2022) menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer berhubungan erat dengan penurunan ketimpangan antardaerah.

Indeks Gini

Indeks Gini adalah alat statistik untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin kecil nilai indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan (World Bank, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan periode 2014 hingga 2024. Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pemilihan data sekunder ini didasarkan pada ketersediaan data yang valid dan terpercaya serta relevan dengan tema penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen adalah Indeks Gini, yang menjadi ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Indeks Gini dipilih karena mampu merefleksikan tingkat pemerataan pendapatan secara komprehensif. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi tiga indikator utama kebijakan fiskal, yaitu pajak sebagai variabel X_1 , pengeluaran pemerintah sebagai variabel X_2 , dan dana transfer daerah sebagai variabel X_3 . Ketiga variabel ini dipilih untuk menguji pengaruh kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Model regresi ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Indeks Gini

X1 = Pajak

X2 = Pengeluaran Pemerintah

X3 = Dana Transfer Daerah

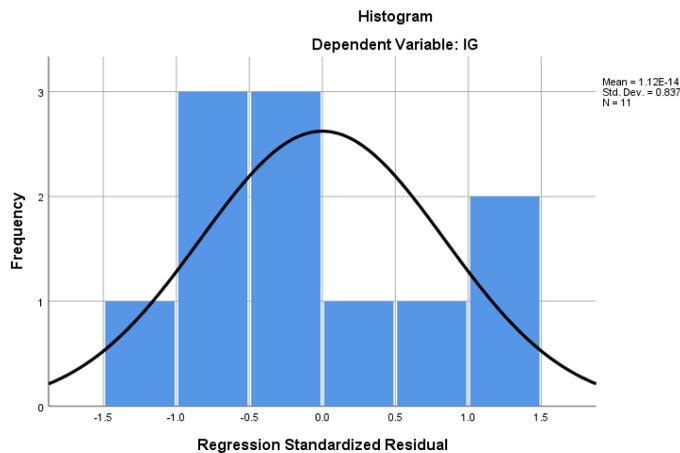
β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

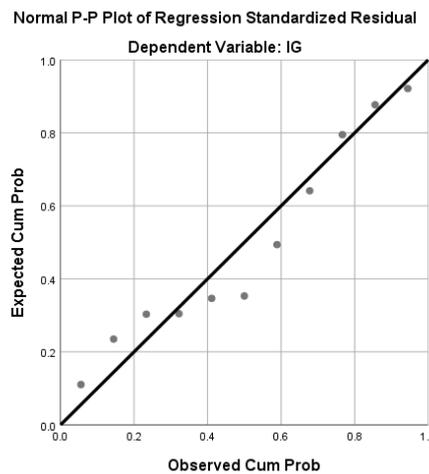
ε = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas



Dilihat dari gambar diatas terlihat bahwa ada garis yang menunjukkan kekonsistenan dengan melihat sisi kiri dan kanan yang seimbang, ini menunjukkan bahwa data terbebas dari uji normalitas.



Terlihat bahwa titik mendekati garis, ini mengartikan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikonearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikonearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independent dalam model regresi, pengujian ada atau tidaknya multikonearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance inflation factor*) dan *Tolerance*. Apakah nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,100 maka diambil Keputusan bahwa model :

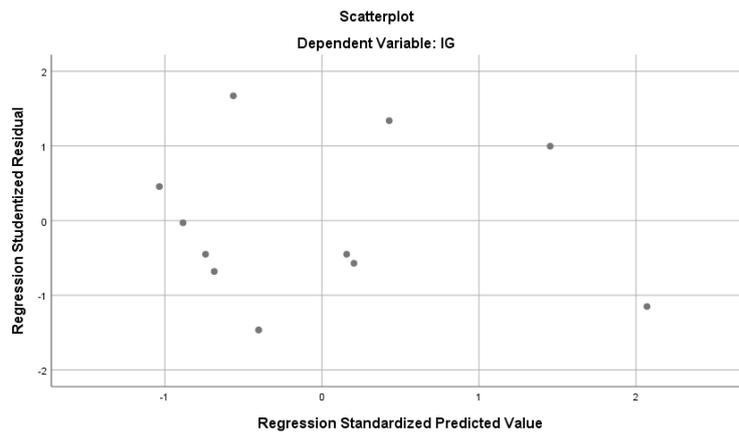
Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.517	.021		25.074	.000		
	Pajak	2.525E-8	.000	1.031	3.151	.016	.134	7.486
	PP	-1.628E-8	.000	-.687	-2.270	.057	.156	6.407
	DTD	-2.155E-7	.000	-1.181	-5.224	.001	.280	3.570

a. Dependent Variable: IG

Interpretasi: Dari hasil diatas didapatkan nilai VIF (lebih besar) < dari 10,00 dan nilai Tolerance (lebih besar) > dari 0,100 maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari Uji Multikonearitas.

Uji Heterodekastisitas

Uji ini ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regeresi linear. Apabila uji ini tidak terpenuhi, maka model dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.



Interpretasi: Dari hasil Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membuat pola tertentu, ini mengartikan bahwa data tersebut terbebas dar heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adakah korelasi antara variabel yang ada didalam model prediksi dengan perubahan waktu.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 ^a	.900	.857	.00448	2.014

a. Predictors: (Constant), DTD, PP, Pajak

b. Dependent Variable: IG

Interpretasi: Dapat dilihat bahwa nilai Durbin-watson berada diantara 2 dan -2 > lebih besar dari Durbin-watson (2.014) > -2 maka data tersebut terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.517	.021		25.074	.000		
	Pajak	2.525E-8	.000	1.031	3.151	.016	.134	7.486
	PP	-1.628E-8	.000	-.687	-2.270	.057	.156	6.407
	DTD	-2.155E-7	.000	-1.181	-5.224	.001	.280	3.570

a. Dependent Variable: IG

Interpretasi:

β_0 = Ketika variabel independen sama dengan nol maka nilai variable Indeks Gini adalah sebesar -0,517 % .

β_1 = Pajak = 2.525E-8 : Ketika pajak naik 1 rupiah maka Indeks Gini akan turun sebesar 2.525E-8 %.

β_2 = Pengeluaran Pemerintah = -1.628E-8: Pengeluaran Pemerintah naik 1 rupiah Indeks Gini akan naik sebesar -1.628E-8%.

B3 = Dana Transfer Daerah = -2.155E-7 : Dana Transfer Daerah naik 1 rupiah maka Indeks Gini akan naik sebesar -2.155E-7 %.

UJI T (Parsial)

T hitung > t tabel atau -T hitung < -T tabel: Ho ditolak, terdapat pengaruh

T hitung < t tabel atau -T hitung > -T tabel: H1 ditolak, tidak terdapat pengaruh

Sig < 0,05 : signifikan

Sig > 0,05 : tidak signifikan

Interpretasi :

- a. Pajak terhadap Indeks Gini. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa T hitung (3.151) > t tabel (0.0280) : Ho ditolak dan sig (0,016) < 0,05 : signifikan, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak terhadap indeks gini.
- b. Pengeluaran pemerintah terhadap indeks gini. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa T hitung (-2.270) < t tabel (0.0280): H1 ditolak dan sig (0,057) > 0,05 : signifikan, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak.
- c. Dana transfer daerah. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa T hitung (-5.224) < t tabel (0.0280) : H1 ditolak dan sig (0,001) > 0,05 : signifikan, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara dana transfer daerah terhadap indeks gini.

UJI F (Simultan)

F hitung > F tabel atau -F hitung < -F tabel: Ho ditolak, terdapat pengaruh

F hitung < F tabel atau -F hitung > -F tabel: H1 ditolak, tidak terdapat pengaruh

Sig < 0,05 : signifikan

Sig > 0,05 : tidak signifikan

		ANOVA ^a				
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.001	3	.000	20.965	.001 ^b
	Residual	.000	7	.000		
	Total	.001	10			

a. Dependent Variable: IG

b. Predictors: (Constant), DTD, PP, Pajak

Interpretasi: Berdasarkan output diatas diketahui F hitung (20.965) > (2.866) ; Ho ditolak dan sig (0.001) < 0,05 : signifikan, artinya secara simultam terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel independent terhadap indeks gini.

Korelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 ^a	.900	.857	.00448	2.014

a. Predictors: (Constant), DTD, PP, Pajak

b. Dependent Variable: IG

Interpretasi: Nilai $R = 0.949$, terdapat hubungan yang kuat antara variabel pajak, pengeluaran pemerintah, dana transfer daerah dan indeks gini

Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 ^a	.900	.857	.00448	2.014

a. Predictors: (Constant), DTD, PP, Pajak

b. Dependent Variable: IG

Interpretasi: Di dapat nilai R-square sebesar 0.900 yang mengartikan bahwa terdapat pengaruh pajak, pengeluaran pemerintah, dana transfer daerah terhadap indeks gini sebesar 90%, dan sisanya 10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang diukur melalui pajak, pengeluaran pemerintah, dan dana transfer daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Indonesia yang diwakili oleh indeks Gini. Peningkatan pendapatan dari pajak cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan karena mekanisme redistribusi yang diterapkan pemerintah. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang efektif juga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dengan mendukung berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Dana transfer daerah memberikan kontribusi positif dalam pemerataan, terutama melalui alokasi fiskal yang mendukung pembangunan daerah-daerah yang kurang berkembang sehingga menurunkan disparitas ekonomi antar wilayah. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menguatkan pentingnya peran kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya terus memperkuat kebijakan perpajakan yang progresif dan transparan agar penerimaan pajak dapat digunakan secara optimal untuk program-program redistribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah perlu difokuskan pada program yang berdampak langsung dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang kurang berkembang. Selain itu, pengelolaan dana transfer daerah harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang pembangunan lokal dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi distribusi pendapatan, seperti kebijakan moneter, investasi asing, atau faktor demografi, guna memperkaya model analisis. Penggunaan data yang lebih terbaru dan detail, misalnya data bulanan atau per sektor, juga sangat dianjurkan agar analisis menjadi lebih mendalam dan hasilnya dapat memberikan masukan yang lebih akurat bagi pengambilan kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menurunkan ketimpangan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Nugroho, H. (2022). "Transfer Fiskal dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia". *Jurnal Administrasi Fiskal*, 6(3), 75–88.
- Rahman, A. (2019). "Efektivitas Kebijakan Pajak terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 45–56.
- Wibowo, B. (2020). "Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia". *Jurnal Keuangan Negara*, 8(1), 22–34.